

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti di Kelas X.4 SMA Negeri 2 Purwakarta, bahwa permasalahan yang dialami oleh guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam proses pembelajaran adalah rendahnya penguasaan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) siswa, yaitu kemampuan menganalisis serta merespon terhadap berbagai persoalan yang menyangkut Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) serta kurangnya partisipasi siswa dalam pemberian argumentasi baik pada saat pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berlangsung maupun dalam menjawab pertanyaan (soal-soal) yang diajukan oleh guru. Hal tersebut terlihat pada hasil perolehan nilai ulangan harian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Nilai Ulangan Harian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Siswa Kelas X.4

<b>Interval Nilai</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persen (%)</b>
38 - 44	2	6
45 - 51	7	23
52 - 58	6	19
59 - 65	9	30
66 - 72	4	13
73 - 79	2	6
80 - 86	1	3
<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>100</b>

Sumber: Dokumen Guru PKn, 2008.

Pernyataan tersebut sejalan dengan konsep Benjamin S. Bloom (dalam Djahiri, 1985: 14) tentang pengembangan kemampuan siswa yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, yaitu:

“Ranah kognitif meliputi: (1) pengetahuan, (2) pemahaman, (3) aplikasi, (4) analisa, (5) sintesa, dan (6) evaluasi. Ranah afektif meliputi: (1) penerimaan, (2) respon, (3) menilai, (4) mengorganisir, dan (5) karakterisasi/mempribadikan, sedangkan ranah psikomotor meliputi: (1) persepsi, (2) kesiapan/kesediaan, (3) imitasi/peniruan, (4) peningkatan/penyempurnaan penyesuaian, dan (5) orisinalisasi/penciptaan”.

Berkaitan dengan hal di atas, cakupan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yaitu kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) menyangkut kemampuan akademik yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum, dan moral termasuk ke dalam ranah kognitif. Kompetensi keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) meliputi keterampilan intelektual (keterampilan berpikir kritis) dan keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk ke dalam ranah psikomotor, sedangkan kompetensi watak atau karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) yang merupakan materi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) termasuk ke dalam ranah afektif. Dimensi ini dapat dipandang sebagai muara dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya.

Siswa yang mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) perlu dibekali dengan berbagai kompetensi, agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang. Namun berdasarkan pengalaman di lapangan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tintin Rosmala Dewi Tahun 2008 dalam skripsinya yang berjudul “*Pengaruh Penggunaan*

*Metode Pemecahan Masalah terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa dalam Pembelajaran PKN*” terdapat masalah problematis yang muncul dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), di antaranya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sejauh ini baru sampai pada pengembangan komponen pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang lebih menitikberatkan kepada kemampuan akademik, sedangkan komponen keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) yang meliputi keterampilan intelektual (keterampilan berpikir kritis) dan keterampilan partisipasi belum terlaksana secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh siswa hanya mengetahui dan menghafal teori serta konsep, tanpa dapat menganalisis, mengkritisi serta mengaplikasikan ke dalam tindakan bermakna melalui partisipasi nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) sangatlah penting untuk dikembangkan melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Tidak dapat dipungkiri, penggunaan metode pembelajaran yang monoton pun menjadi salah satu faktor penyebab kurang tergalinya keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) pada siswa. Penggunaan metode ceramah yang terkesan dogmatis dan doktriner membuat siswa pasif dan kurang terlatih untuk berpikir kritis-analitis-argumentatif.

Keberhasilan proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tidak lepas dari komponen-komponen yang terlibat di dalamnya baik siswa, guru, bahan ajar, alat dan metode yang digunakan, serta lingkungan belajar. Di antara komponen-komponen tersebut, komponen guru mempunyai peranan yang sangat

besar dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran, baik dalam pembuatan perencanaan pengajaran, pemilihan bahan ajar, pemilihan media dan metode, maupun evaluasi yang digunakan dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka diperlukan sebuah metode untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode pembelajaran yang diharapkan dapat mengatasi kesulitan guru di kelas khususnya dalam meningkatkan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) siswa yang terdiri atas keterampilan berpikir kritis serta keterampilan partisipasi siswa dalam memecahkan beragam permasalahan yang terjadi di masyarakat. Metode tersebut adalah metode pemecahan masalah, seperti yang dikemukakan oleh Djahiri (1983: 133), yang dikutip oleh Tintin Rosmala Dewi (2008: 30) menyatakan bahwa “metode pemecahan masalah adalah metode yang lebih menitikberatkan kepada terpecahkannya sesuatu masalah yang menuntut perkiraan rasio atau logis, benar dan tepat”.

Adapun langkah-langkah dalam penerapan metode pemecahan masalah yang akan digunakan pada penelitian ini dilakukan melalui tujuh tahap, yaitu: (1) merumuskan masalah, (2) menganalisis masalah, (3) merumuskan hipotesis/jawaban sementara, (4) mengumpulkan data, (5) pengujian hipotesis/jawaban sementara, (6) penarikan kesimpulan, dan (7) perumusan alternatif pemecahan masalah.

Penelitian mengenai metode pemecahan masalah ini telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti di berbagai sekolah, salah satunya Rini Nurgianti Tahun 2008 dalam skripsinya yang berjudul “*Penerapan Metode Pemecahan Masalah*

*(Problem Solving Method) dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Pembelajaran PKn*". Dalam skripsinya ia membuktikan bahwa proses pembelajaran PKn dengan menggunakan metode pemecahan masalah (*problem solving method*) dapat memperlihatkan kecenderungan yang meningkat terhadap motivasi belajar siswa dalam bentuk keterlibatan (keaktifan) siswa dalam proses pembelajaran, siswa menyimak dan memperhatikan penjelasan guru dalam proses pembelajaran secara seksama, serta keberanian siswa dalam bertanya, berpendapat, dan menjawab pertanyaan dengan baik dari guru maupun siswa lain.

Adapun alasan pentingnya metode pemecahan masalah dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yaitu karena belajar pada prinsipnya adalah suatu proses interaksi antara manusia pada lingkungannya. Proses ini dapat juga sebagai proses internalisasi, dengan demikian di dalam proses interaksi tersebut manusia aktif memahami dan menghayati makna dari lingkungan. Proses ini berlangsung secara bertahap, mulai dari menerima stimulus dari lingkungan, sampai pada memberi respon yang tepat terhadapnya (Gulo, 2005: 111).

Sejalan dengan ini, Udin Saripudin Winataputra Tahun 2001 dalam disertasinya yang berjudul "*Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi*" memaparkan bahwa terdapat salah satu kompetensi dasar keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) yaitu kemampuan menganalisis masalah kemasyarakatan/kenegaraan secara kritis, dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang tersedia serta dengan niat baik yang tulus. Untuk mengasah kemampuan tersebut, siswa hendaknya dihadapkan

kepada masalah-masalah yang memerlukan sebuah solusi atau pemecahan masalah. Paparan tersebut menegaskan bahwa metode pemecahan masalah dapat digunakan sebagai obat pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) siswa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mewujudkan tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dalam hal ini untuk meningkatkan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) siswa secara optimal, guru harus menggunakan metode yang lebih efektif dari biasanya. Salah satunya yaitu metode pemecahan masalah. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang dikemas dalam sebuah judul, yaitu:

**PENERAPAN METODE PEMECAHAN MASALAH UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN KEWARGANEGARAAN (*CIVIC SKILLS*) SISWA (Penelitian Tindakan Kelas pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Kelas X.4 SMA Negeri 2 Purwakarta).**

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat dua rumusan masalah yaitu rumusan secara umum dan secara khusus. Secara umum, fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Adakah peningkatan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) siswa dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) melalui penerapan metode pemecahan masalah di kelas X.4 SMA Negeri 2 Purwakarta?”.

Adapun rumusan masalah secara khusus pada penelitian ini, meliputi:

1. Bagaimana perencanaan guru untuk mempersiapkan metode pemecahan masalah pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di kelas X.4 SMA Negeri 2 Purwakarta?.
2. Bagaimana implikasi metode pemecahan masalah terhadap peningkatan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) siswa pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di kelas X.4 SMA Negeri 2 Purwakarta?.
3. Apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi guru dalam penerapan metode pemecahan masalah pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di kelas X.4 SMA Negeri 2 Purwakarta?.
4. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerapan metode pemecahan masalah pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di kelas X.4 SMA Negeri 2 Purwakarta?.

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) siswa melalui penerapan metode pemecahan masalah pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di kelas X.4 SMA Negeri 2 Purwakarta melalui penelitian tindakan kelas.

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengidentifikasi perencanaan guru dalam mempersiapkan metode pemecahan masalah pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di kelas X.4 SMA Negeri 2 Purwakarta.
- b. Untuk mengetahui implikasi metode pemecahan masalah terhadap peningkatan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) siswa pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di kelas X.4 SMA Negeri 2 Purwakarta.
- c. Untuk mengidentifikasi hambatan atau kendala yang dihadapi guru dalam penerapan metode pemecahan masalah pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di kelas X.4 SMA Negeri 2 Purwakarta.
- d. Untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penerapan metode pemecahan masalah pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di kelas X.4 SMA Negeri 2 Purwakarta.



## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara:

### **1. Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan khususnya dalam pengembangan metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang bersifat demokratis, mendorong aktivitas dan kreativitas siswa, berbasis nilai dan mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

### **2. Praktis**

#### **a. Guru**

Guru terampil dalam menerapkan metode pemecahan masalah khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam upaya meningkatkan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) siswa.

#### **b. Siswa**

Meningkatkan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) siswa, sehingga siswa mampu berpikir kritis-analitis-argumentatif serta terlatih untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

#### **c. Sekolah**

Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 2 Purwakarta, khususnya dalam hal optimalisasi pengembangan metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

## E. PENJELASAN ISTILAH

Untuk menghindari kekeliruan mengenai maksud dan tujuan yang ingin dicapai, berikut ini ialah penjelasan istilah yang digunakan, meliputi:

1. Metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (KBBI, 2002: 740) adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.
2. Metode Pemecahan Masalah (*Problem Solving Method*) menurut Sudirman dkk (1987: 146) adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dan disintesis dalam usaha mencari pemecahan masalah atau jawabannya oleh siswa. Permasalahan itu dapat diajukan/diberikan kepada siswa, dari siswa bersama guru, atau dari siswa itu sendiri, yang kemudian dijadikan pembahasan yang dicari pemecahannya ini sebagai kegiatan pembelajaran siswa. Metode pemecahan masalah ini sering disebut pula sebagai *problem solving method*, *reflective thinking method*, atau *scientific method*.
3. Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skills*) menurut Winataputra dan Budimansyah (2007: 188-190) adalah kecakapan kewarganegaraan yang terdiri atas kecakapan berpikir kritis dan kecakapan partisipasi yang bertanggung jawab, efektif, dan ilmiah dalam proses politik dan dalam *civil society*.

4. Keterampilan Berpikir Kritis menurut Suryati (2000: 11) yaitu kemampuan menganalisis terhadap berbagai persoalan yang menyangkut mata pelajaran, memberikan argumentasi, memunculkan wawasan dan memberikan interpretasi.
5. Keterampilan Partisipasi menurut Sapriya (2002: 73) ialah kegiatan mengembangkan kecakapan dan rasa percaya diri siswa dalam kerja kelompok dan dalam proses mengambil keputusan. Para siswa juga didorong untuk menilai apakah kecakapan yang dilatihkan di kelas ada manfaatnya dengan kehidupan mereka sehari-hari dan masa yang akan datang.
6. Pembelajaran menurut Ibrahim (2002: 18) yaitu proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
7. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menurut Somantri (2001: 299) adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.